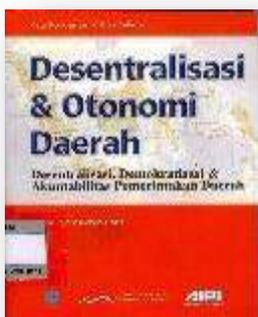


## RESENSI BUKU



Judul	:	<b>Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah</b>
Pengarang	:	Syamsuddin Haris (ed)
Penerbit	:	Jakarta : LIPI Press, 2007
Kolasi	:	xviii, 416 hal, 14 x 21 cm
ISBN	:	978-979-98014-1-8

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang berisi tentang pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi proses implementasi otonomi daerah yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2000 ini dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala-kendala, baik itu pada tataran konseptual maupun praktek-praktek di lapangan. Oleh karena itu, guna membahas masalah ini, pada tahun 2002 diadakan *workshop* yang menampilkan pakar, praktisi, birokrat, dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah otonomi daerah. Hasil dari *workshop* tersebut kemudian dibukukan dan diberi judul *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*.

Syamsudin mengatakan bahwa proses implementasi otonomi daerah yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2000 ini dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan mulus dan masih menghadapi kendala-kendala, baik pada tataran konseptual maupun praktek-praktek lapangan yang jika tidak dilakukan perbaikan akan menghambat tujuan otonomi daerah itu sendiri. Untuk mengkaji kembali pelaksanaan otonomi daerah ini Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bekerja sama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* dan Universitas Diponegoro

Menurut Syamsudin buku *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* merupakan tiga kata kunci yang penting dalam implementasi otonomi daerah. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak saling terpisahkan. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban di dalam konteks politik merupakan suatu konsep yang melekat di dalam teori dan praktek demokrasi. Di situlah terlihat bahwa semangat demokrasi jelas menghendaki suatu pemerintahan yang bersendikan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." Karenanya, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat, sebab bertanggung-jawabannya pengusaha kepada rakyat berarti mengakui bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya.

Selain itu dalam buku ini juga mengulas permasalahan *Desentralisasi, demokratisasi, dan akuntabilitas pemerintah daerah* dari pengalaman empirik maupun teoretik. Pengalaman empirik dibahas oleh sejumlah narasumber yang terlibat secara langsung dalam praktek otonomi daerah. Sementara pandangan teoretik dikaji oleh sejumlah ilmuah politik. Sebagai hasil *workshop*, buku ini juga memberikan solusi akademik mengenai permasalahan yang timbul di dalam implementasi otonomi daerah.

Buku ini terdiri dari 23 makalah yang merupakan hasil kajian yang telah dibahas dalam workshop dan sebagian besar merupakan studi evaluatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi tajam dalam workshop tersebut yaitu masalah demokrasi dan akuntabilitas daerah, masalah kinerja DPRD dan pemerintah daerah, munculnya konflik horizontal dan fenomena etnisitas, problematik pertimbangan keuangan pusat-daerah. Sehingga buku ini dapat dijadikan pertimbangan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Bagian pertama buku ini membahas mengenai masalah demokratisasi dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Hal-hal yang ditinjau di sini meliputi latar belakang pembentukan otonomi daerah, pembentukan *good governance*, dan pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca diberlakukannya UU tentang pemerintahan daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi juga dibahas cukup banyak karena menjadi faktor penting bagi daerah dalam pengimplementasian otonomi daerah yang baik.

Selanjutnya akuntabilitas dan kinerja DPRD - pemerintah daerah menjadi tema pada bagian kedua. Bagian ini terdiri dari lima makalah yang menjelaskan perubahan hubungan kedua lembaga tersebut dan implikasinya terhadap sistem baru pemerintahan daerah. Hal-hal yang dibahas mengenai manfaat dan distorsi yang terjadi karena hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD kini menjadi sejajar. Perubahan tersebut dirasa sangat berpengaruh dimana Kepala Daerah tidak dapat lagi mengambil keputusan secara sepihak karena harus meminta persetujuan dahulu dari DPRD sehingga sering menimbulkan masalah.

Permasalahan lainnya yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah konflik horizontal dan munculnya fenomena etnosentrisme yang dibahas pada bagian ketiga. Pada umumnya keenam makalah yang ada pada bagian ini membahas konflik-konflik yang terjadi akibat dilaksanakannya otonomi daerah baik secara kelembagaan maupun konflik antar komunitas masyarakat.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan otonomi daerah adalah masalah perimbangan keuangan pusat - daerah yang dibahas pada bagian keempat. Ketiga makalah di dalamnya melihat bahwa telah banyak terjadi perubahan mengenai pengelolaan keuangan daerah setelah keluarnya UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat - daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dan memberikan kebebasan bagi daerah untuk menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun demikian, UU tentang keuangan daerah ini belumlah sempurna karena masih belum memperhitungkan daerah-daerah yang miskin sumber dayanya.

Pada bagian selanjutnya diuraikan contoh kasus-kasus daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Mardiyanto dan Drs. Saleh Soeaidy membahas pengalaman daerah Jawa Tengah, Drh. Chaidir, MM lebih menyoroti pengalaman propinsi Riau dalam penguatan otonomi daerahnya, dan Prof. Drs. Ishak Pulukadang membahas pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Secara umum pada bagian ini hal-hal yang dikemukakan hanya sebatas kebijakan yang diambil dan permasalahan yang dihadapi selama ini tetapi belum menyentuh hasil-hasil yang didapat dari penerapan otonomi daerah tersebut. Hal itu dapat dimaklumi mengingat makalah-makalah tersebut dibuat belum lama dari dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah.

Buku setebal 416 halaman ini merupakan kumpulan makalah para ahli di bidang otonomi daerah yang dikumpulkan dari hasil workshop yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia dan Universitas Diponegoro pada tanggal 25 - 27 Maret 2002. Makalah-makalah tersebut

merupakan hasil kajian serius yang telah dibahas dalam workshop tersebut dan sebagian besar merupakan studi evaluatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Hal yang menarik lainnya adalah pada bagian terakhir buku ini (bagian keenam), terdapat rekomendasi RUU Otonomi Daerah yang diusulkan oleh LIPI. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa RUU ini didasarkan pada pandangan bahwa otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat (hal. 413).

Kekurangan pada buku ini adalah terlalu berpatok pada makalah hasil workshop pada tahun 2002 yang notabene hanya setahun setelah dikeluarkannya UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999. Walaupun ini merupakan buku cetakan ketiga, sebaiknya diberikan juga penjelasan kondisi otonomi daerah sekarang seperti ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 2002, atau daerah-daerah yang berhasil mengimplementasikan otonomi daerah seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Sragen, dan yang lainnya.

Secara keseluruhan buku ini dapat dikatakan telah lengkap membahas permasalahan yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah dan menampilkan banyak pakar yang kompeten dalam bidang pemerintahan. Didukung komprehensivitas pembahasan yang runtut dan rinci menjadikan buku ini tidak saja penting bagi pihak-pihak yang berminat dan menggeluti manajemen otonomi daerah, tetapi juga harus dimiliki oleh para mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Politik, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bagi masyarakat umum, buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap otonomi daerah di Indonesia. **(Dra. Rina Christina, Muhammad Afif Muttaqin, S.Sos)**